



**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DESA NGORO
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Mardani Fitria Ningrum

NPM. 21901082108



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

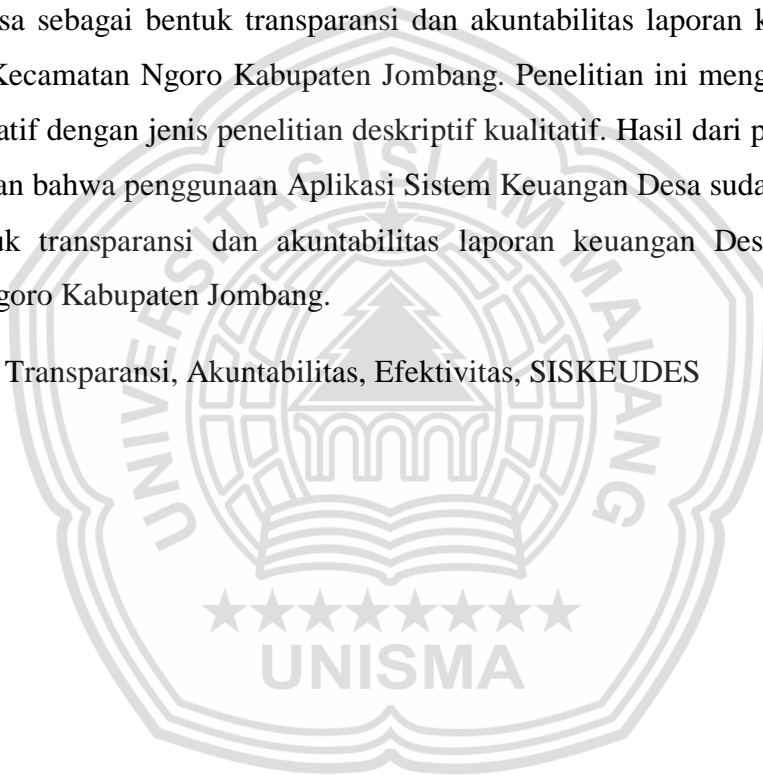
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2023

ABSTRAK

Pemerintah pusat mewajibkan untuk pemerintah desa agar membuat laporan APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja aparatur desa kepada masyarakat atau publik yang berguna untuk mengukur hasil kinerja pemerintahan desa dan merupakan bentuk transparansi, akuntabilitas laporan keuangan Desa Ngoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menandakan bahwa penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah efektif sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

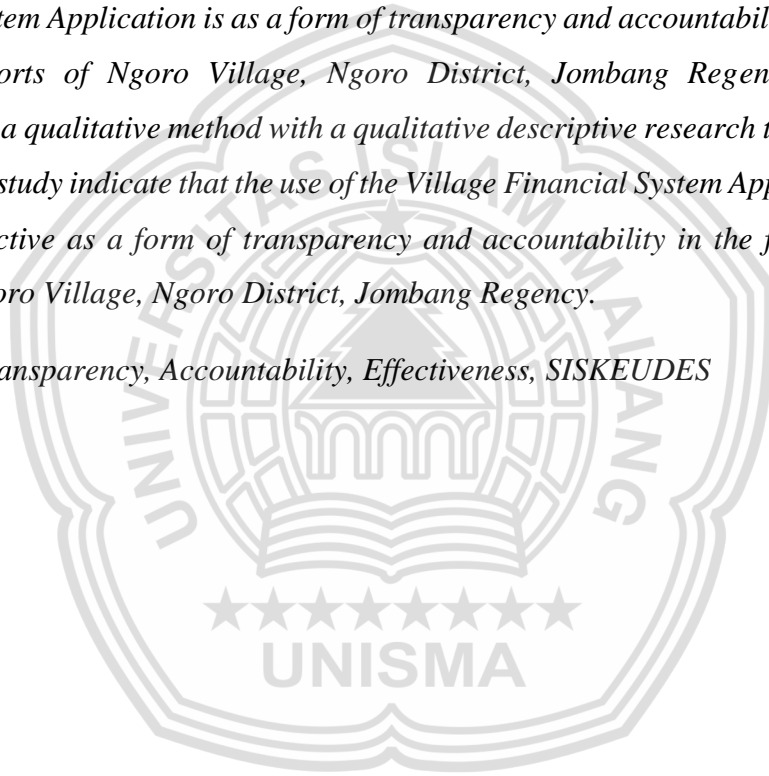
Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, SISKEUDES



ABSTRACT

The central government requires the village government to make APBDes reports and reports on the realization of APBDes implementation as a form of accountability for the performance of village apparatus to the community or the public which is useful for measuring the results of village government performance and is a form of transparency, accountability in the financial reports of Ngoro Village. The purpose of this study is to find out how effective the use of the Village Financial System Application is as a form of transparency and accountability in the financial reports of Ngoro Village, Ngoro District, Jombang Regency. This research uses a qualitative method with a qualitative descriptive research type. The results of this study indicate that the use of the Village Financial System Application has been effective as a form of transparency and accountability in the financial reports of Ngoro Village, Ngoro District, Jombang Regency.

Keywords: *Transparency, Accountability, Effectiveness, SISKEUDES*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya dan penetapan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa mendapatkan kesempatan untuk mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan. Arsyad (2016:48) menegaskan bahwa desa memiliki potensi ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, harus dikembangkan dengan maksimal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Pemerintah desa merupakan tingkat terkecil yang membantu pemerintah pusat yang berhubungan langsung dengan pembangunan, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah desa adalah pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa diharapkan dapat menjalankan tugas pemerintah desa dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat terlayani. Juardi *et al.*, (2018) menjelaskan bahwa pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintah dan sumber dayanya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa dan kapasitasnya.

Bentuk evaluasi kinerja pemerintah desa adalah kualitas laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan dapat dikatakan baik jika dalam proses pengelolaan keuangannya sudah akuntabel dan transparan sesuai dengan tuntutan pemerintah. Sehubungan dengan itu menurut Adi (2011:119)

pemerintah desa mampu menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat akan menilai dengan baik jika kualitas laporan keuangan desa juga semakin baik. Sementara laporan keuangan yang tidak tepat memberikan peluang untuk ketidakwajaran dan penyalahgunaan, mereka juga dapat menyebabkan terjadinya penipuan, korupsi, dan kolusi yang dapat menyebabkan tuntutan hukum. Karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang laporan keuangan. Oleh karena itu, seharusnya laporan keuangan disajikan secara akurat dan tidak ada kesalahan penyajian untuk menghindari penyalahgunaan laporan keuangan. Pengelola keuangan yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang manajemen keuangan dapat membuat kesalahan material dalam penyajian data, penyampaian yang tidak tepat waktu, dan pengungkapan yang tidak konsisten yang dapat merugikan pembaca, pengguna, dan penyaji laporan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 menjelaskan tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa pemerintah desa wajib untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang mewujudkan untuk pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah untuk masyarakat. Pengungkapan dan pertanggungjawaban laporan keuangan desa dipergunakan masyarakat sebagai penilaian kinerja aparatur desa serta

berguna untuk membuktikan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk informasi yang berkorelasi dengan tata kelola keuangan desa.

Kewajiban desa sendiri adalah untuk mengelola keuangan secara sehat agar tidak terjadi kecurangan atau penyelewengan dalam pengelolaan anggaran desa karena hal ini dapat mengarah pada desa yang lebih baik, maju, bebas dan sejahtera. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam menciptakan kinerja pemerintahan yang baik.

Dengan adanya transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik mengenai kinerja pemerintahan. Pengelolaan keuangan desa diharuskan untuk melaksanakan transparansi laporan keuangan desa dan akuntabilitas namun kenyataan dilapangan, transparansi pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas masih tergolong rendah (Manoppo & Arie, 2016). Nyland & Pettersen (2015) menjelaskan bahwa rendahnya transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas pada masyarakat dapat mengakibatkan gagalnya administrasi, keputusan politik rendah dan juga angka korupsi yang tinggi. Adanya faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu terbatasnya pendukung sumber daya manusia pada publikasi keuangan, akibatnya laporan keuangan yang dihasilkan kurang transparan terhadap masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan dana.

Dari permasalahan tersebut, untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desanya, pada tahun 2015 ini pemerintah pusat melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat aplikasi keuangan desa yang diberi nama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dulu diberi nama SIMDA juga bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam membuat dan melaporkan keuangannya, sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan desa yang lebih baik. Dengan terciptanya sistem pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangan desa dan pendokumentasian menjadi lebih mudah karena jumlah file yang efisien dan penggunaan data jangka panjang (Rusmayanti, 2014).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang digunakan oleh aparatur desa dalam memproses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES secara otomatis membuat berbagai laporan yang dibutuhkan, oleh karena itu dapat meminimalisir waktu serta biaya, mengurangi adanya kesempatan dalam penipuan, kecurangan, dan mendukung agregasi data. Selain berbasis online, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) juga disiapkan secara offline atau manual, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada di desa dan kondisi yang berbeda di setiap daerah. Fitur yang ada pada aplikasi ini dibuat sederhana dan mudah digunakan yang didukung oleh petunjuk pelaksanaan, untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, untuk mematuhi peraturan yang

berlaku, dan untuk memastikan bahwa semua desa menatausahakan seluruh anggarannya yang dikelola oleh desa (Rivan & Maksum, 2019).

Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang tata kelola keuangan desa menetapkan kebijakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dimana kebijakan ini harus dirancang untuk memenuhi tujuan dari adanya Aplikasi SISKEUDES agar pengelolaan keuangan desa dapat dibuat lebih transparan, efisien, efektif serta mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan dengan cara pengelolaan yang tertib dan disiplin anggaran. Kemendagri mengeluarkan SE Nomor 147/8350/BPD mengarahkan agar SISKEUDES diberikan secara gratis. Proses sosialisasi serta bimtek untuk aparatur pemerintah desa dilaksanakan dengan pembiayaan APBD. (kominfo.go.id)

Sebelum memproses laporan keuangan menggunakan Aplikasi SISKEUDES pemerintah Desa Ngoro masih menggunakan pengolahan manual yaitu menggunakan Software Microsoft Excel dan Microsoft Word, pengolahan manual ini masih dianggap kurang efektif salah satunya adalah waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan terlalu lama dan melebihi batas waktu pelaporan kepada pemerintah pusat, namun sejak Aplikasi SISKEUDES diterbitkan pemerintah merasa terbantu dalam memanfaatkan aplikasi tersebut dimana lebih mudah dan efisien dibandingkan melakukannya secara manual. Oleh karena itu, untuk mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES aparatur desa membutuhkan perangkat keras komputer dan konektivitas internet untuk memudahkan saat pengoperasian aplikasi tersebut. Dengan hal itu saat

pengoperasian Aplikasi SISKEUDES di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro terdapat kendala pada sistem. Aplikasi SISKEUDES di Desa Ngoro diterapkan sejak tahun 2017 dirasa masih baru seiring dengan perkembangan IPTEK di kalangan aparaturnya Desa Ngoro.

Hasil dari penelitian Indriati *et al.*, (2020) yang melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron”. Hasil penelitian tersebut adalah membuktikan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron yang sudah diterapkan sejak tahun 2017 masih kurang efektif dan optimal dikarenakan komitmen pemerintah kabupaten dan provinsi saat pengoperasian Aplikasi SISKEUDES masih lemah, serta sepenuhnya sumber daya manusia kurang mampu menguasai aplikasi tersebut.

Dengan fenomena yang telah dijelaskan diatas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro dalam mengelola keuangan desa dengan judul penelitian **“Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari fenomena yang sudah dijabarkan pada latar belakang masalah maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan kajian ilmu pemerintah, khususnya pada penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa secara efektif dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan yang sudah tertulis, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan Aplikasi SISKEUDES di Desa Ngoro bisa dikatakan efektif karena sarana dan prasarana untuk mendukung pengoperasiannya memadai dan sumber daya manusia yang baik karena mampu mengoperasikan dengan tepat sehingga dihasilkan laporan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dapat membantu Desa Ngoro sebagai bentuk transparansi laporan keuangan desa ngoro karena laporan keuangan yang telah dihasilkan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sudah jelas, akurat, tepat waktu, mudah diakses, dan dapat dibandingkan antar periode atau instansi yang serupa.
3. Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dapat membantu pemerintah Desa Ngoro sebagai bentuk akuntabilitas laporan keuangan desa, karena laporan keuangan yang telah dihasilkan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat maupun kalangan masyarakat atau publik, oleh karena itu laporan keuangan Desa Ngoro bisa dikatakan akuntabel.

5.2 Keterbatasan

Penelitian yang sudah dilakukan masih ada keterbatasan, beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Peneliti hanya mengambil satu desa yaitu Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebagai objek penelitian.
2. Kurang tersedia website desa sebagai wadah atau tempat untuk mencari sumber informasi yang ada tentang keadaan Desa Ngoro terutama dalam aspek Keuangan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang sudah dilakukan, oleh karena itu peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah objek penelitian lebih dari satu tempat sebagai tempat penelitian untuk pembandingan antar desa dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis uji beda.
2. Sebaiknya Desa Ngoro membuat website sebagai wadah atau tempat untuk mencari sumber informasi tentang Desa Ngoro terutama dalam aspek Keuangan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2011. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Cetakan ke 3.
- Akuntabel, Y., & Transparan, D. A. N. (2020). *O l e h ADE MYRNA ALFINA NIM : 16520132*.
- Amas, N. W., Bake, J., & Alam, S. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Pelaporan Keuangan Di Kabupaten Kolaka. *Publika : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 232. <https://doi.org/10.33772/publica.v11i2.12780>.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln, 2016. *Analisis Potensi Ekonomi Daerah*, Program Pemdes, Yogyakarta: BPFE.
- Campbell, J. P. (1989). Dietary treatment of infant colic: a double-blind study. *The Journal of the Royal College of General Practitioners*, 39(318), 11–14.
- Gayatri, & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 113–122.
- Ghony Djunaedi, Almanshur Fauzan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hery. 2017. *Analisis Laporan Keuangan, Cet. 2*. Jakarta. Grasindo.
- Indrianti, R., Herman, M., & Fibriyanita, F. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron. *Jurnal Eprints.Uniska*, 5(1), 1–10.
- Juardi, Sardi, M., Muchlis, M., & Amalia Putri, R. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV, 2597–9116.
- Kasmir. (2014). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lukito, C. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2(1), 36–42.

- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Manoppo, H., & Arie, F. V. 2016. *Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014*, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. . PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mooduto, W. I. S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Kabila. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 27–34. <https://doi.org/10.47918/v1i1.8>.
- Muharsono, & Linda Asfiah. (2021). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 14(02), 328–338. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v14i02.298>.
- Nyland, Kari and Pettersen, I. Johanne. 2015. *Hybrid Controls and accountabilities in public sector management. International Journal of Public Sector Management*, Vol. 22 Iss 2 pp. 105-120. Norway: Trondheim Business School.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, <http://www.bpkp.go.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diambil dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>. Diakses Pada 20 Oktober 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, <http://www.bpkp.go.id>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tentang Tata Kelola Keuangan Desa, <http://www.bpkp.go.id>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145. <https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1719>.
- Rivan, Arif & Maksu, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2), 92–100. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2487>.
- Rusmayanti, A. (2014). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Ngadirejan. *Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 6(2), 35–39.
- Sari, W., & Wiyanto, H. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Kualitas Laba Perusahaan. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 4(3), 701–711. <https://doi.org/10.24912/jmk.v4i3.19764>.
- Saskia, N. A., Amin, M., & Junaidi, J. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, Value For Money Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(11).
- Satori, D. Dan Komariah, A. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Situs resmi BPKP Buku kerja Aplikasi sistem keuangan desa tahun 2016 <http://www.bpkp.go.id>, Diakses pada 25 Oktober 2022.
- Situs resmi BPKP Buku kerja sistem keuangan desa <http://www.bpkp.go.id>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.
- Simbolon, Anthon, 2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Edisi Revisi, Penerbit UGM, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Turner, Mark and Hulme, David ,1997. Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work. London: MacMillan Press Ltd.
- Undang–Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.